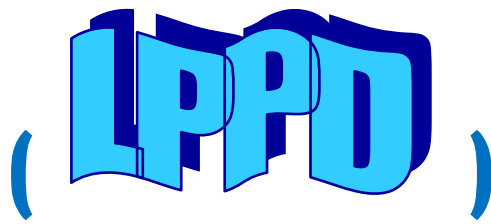


**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**



SESAOT

**AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Narmada dan Bupati Lombok Barat sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sesaot serta semua pihak yang berkepentingan.

Sesaot.....2020

Kepala Desa

(YUNI AHRI SENI.S.Pd)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.3. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3
1.4. Strategi dan Kebijakan	4

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	9
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	10
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	10
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	11
2.6. Keberhasilan yang Dicapai	18
2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh.....	21

BAB III PENUTUP.....	22
----------------------	----

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa, maka Kepala Desa dalam hal ini selaku Pemegang Pemerintahan Desa melaksanakan tanggung jawab dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang pedoman Peraturan Di Desa.

1.2. GAMBARAN UMUM DESA

a. Kondisi Umum Desa

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa maka penting untuk pemangku kebijakan untuk memahami kondisi desa bertujuan untuk mengetahui kaitannya antara perencanaan sebagai data pendukung dan sasaran dalam menggali permasalahan yang ada dalam rangka membuat keputusan pembangunan yang terarah sebagai langkah pendayagunaan dan pemanfaatan potensi desa dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat

b. Sejarah Desa Sesaot

Desa Sesaot merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB yang berdiri sejak tahun 1969 yang berada di wilayah Hutan lindung Provinsi NTB. Pada awal terbentuknya Desa Sesaot terdiri dari 10 dusun meliputi:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Gontoran | 6. Ngis |
| 2. Sesaot Lauk | 7. Batu Asak |
| 3. Penangke | 8. Karang Mejeti |
| 4. Sambik Baru | 9. Pembuwun |
| 5. Sesaot Daye | 10. Repok Temas |

Kemudian pada tahun 2011 Desa Sesaot mekar menjadi dua Desa yaitu Desa Sesaot dan Desa Buwun Sejati. Sampai dengan saat ini desa Sesaot terdiri dari 6 dusun yaitu :

1. Dusun Gontoran,
2. Dusun Sesaot Timuk,
3. Dusun Sesaot Lauk
4. Dusun Penangke
5. Dusun Sambik Baru,
6. Dusun Temas Lestari,

Adapun batas-batas Desa Sesaot yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Selatan : Desa Suranadi
- Sebelah Timur : Desa Pakuan
- Sebelah Barat : Desa Buwun Sejati

Sedangkan Kepala Desa yang pernah menjabat hingga yang menjabat sampai saat ini yaitu sebagai berikut :

- Periode I Tahun 1969 – 1994 dijabat oleh Bapak MUHAMMAD TAJUDIN.
- Periode II Tahun 1995 – 2001 di jabat oleh Bapak H. JUMADIL AWAL.
- Periode III Tahun 2002 – 2007 di jabat oleh Bapak M. ISHAK.
- Periode IV Tahun 2008 – 2013 dijabat oleh Bapak SUDIAH. S.H
- Periode V Tahun 2013-2019 di jabat oleh Ibu YUNI HARI SENI.S.Pd.
- Periode VI Tahun 2019-2025 Sampai dengan sekarang di jabat oleh Ibu YUNI HARI SENI.S.Pd.

c. Demografi

Desa Sesaot terdiri dari enam Dusun Jumlah penduduk keseluruhan 5.855 jiwa dengan jumlah penduduk Laki – laki 2.958 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.897 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.897 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut tersebar di 6 Dusun.

Jarak tempuh ke propinsi : 20 km jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 30 km, Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 9 km.

d. Jumlah Penduduk

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut sebaran di masing-masing dusun dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki	Perempuan	Total
1	Gontoran	561	558	1119
2	Sesaot Timuk	533	420	953
3	Sesaot Lauk	475	553	1028
4	Penangke	533	505	1038
5	Sambik Baru	513	501	1014
6	Temas Lestari	343	360	703
Jumlah Total Penduduk		2958	2.897	5855

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Desa Tahun 2020

1. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sesaot mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1559 orang	1574 orang
2.	Kristen	1 orang	1 orang
3.	Hindu	355 orang	293 orang
4.	Katolik	- Orang	- Orang
5.	Budha	- orang	- orang
6.	Khonguchu	Orang	Orang
7	Aliran kepercayaan lainnya	Orang	- orang

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Desa Tahun 2020

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat Pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 PAUD	130 orang	134 Orang
2.	Usia 3-6 TK/Play Group	22 orang	28 Orang

3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	30 orang	31 Orang
4.	7-18 tahun yang sedang sekolah	376 orang	266 Orang
5.	18-56 yang tidak pernah sekolah	144 orang	348 Orang
6.	18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	52 orang	92 Orang
7.	Tamat SD/ Sederajat	204 orang	157 Orang
8.	Tamat SMP/ Sederajat	515 orang	474 Orang
9.	Tamat SMA/ Sederajat	349 orang	310 Orang
10.	Tamat D-1/ Sederajat	10 orang	3 Orang
11.	Tamat D-2/ Sederajat	- orang	- Orang
12.	Tamat D-3/ Sederajat	2 orang	2 Orang
13.	Tamat S-1/ Sederajat	40 orang	4 Orang
14.	Tamat S-2/ Sederajat	2 orang	- Orang
15.	Tamat S-3/ Sederajat	- orang	- Orang
16.	Tamat SLB A	- orang	- Orang
17.	Tamat SLB B	- orang	- Orang
18.	Tamat SLB C	- orang	- Orang

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Desa Tahun 2020

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Sesaot sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	128 Orang	66 Orang
2	Buruh tani	368 Orang	225 Orang
3	Peternak	290 Orang	45 Orang
4	TNI	5 Orang	- Orang
5	POLRI	3 Orang	- Orang
6	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	11 Orang	2 Orang
7	Karyawan perusahaan swasta	11 Orang	- Orang
8	Seniman/Artis	- Orang	1 Orang
9	Montir	5 Orang	- Orang
10	Stap Desa	4 Orang	3 Orang

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Desa Tahun 2020

4. Keadaan Sosial

Desa sesaot merupakan desa wisata yang berada di wilayah hutan lindung, sehingga Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sesaot bergerak dibidang pertanian dan perkebunan dengan mengelola tanah hutan Negara. Selain itu potensi dan pengelolaan wisata hutan dan alam masih terkedala beberapa hal dalam pengelolaannya sehingga pada sektor ini belum maskimal menarik tenaga pekerja yang professional. Sehingga Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencapaian penduduk adalah pengolahan hasil hutan yang terintegrasi dengan perekmangan ekonomi dan pemanfaatan potensi dalam mengembangkan wisata desa sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Makah hal tersebut perlu diperhatikan dalam pembangunan desa

yaitu melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha hasil kehutanan khususnya di ekonomi produktif dalam menghasilkan produk unggulan desa dari hasil pengolahan hutan dan perkebunan serta pengembangan ekonomi wisata alam.

Tingkat angka kemiskinan Desa Sesaot yang masih tinggi menjadikan Desa Sesaot harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Sesaot seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak dan Pokdarwis merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan penggerak pembangunan dalam setiap proses pembangunan desa

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Jumlah penduduk miskin	1240 KK	
2	Jumlah penduduk sedang	500 KK	
3	Jumlah penduduk kaya	157 KK	

PENGANGGURAN

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jumlah penduduk usia 25 s/d 55 yang belum bekerja	877	
2.	Jumlah angkatan kerja usia 25 s/d 55 tahun	1166	

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Unit	Jenis Fasilitas Kesehatan	Unit
1.	Gedung PAUD	2	Poskesdes	1
2.	Gedung SLB	-	Posyandu	6
3.	Gedung SD	3	Polindes	1
4.	Gedung SMP/MTs	1		
5.	Gedung SMA	-		

5. Kesehatan Masyarakat

Untuk angka kematian ibu dan bayi dapat dinyatakan relatif kecil, walaupun begitu berdasarkan hasil Indeks desa membangun masih terdapat

angka stunting di wilayah desa sesaot. Sehingga di perlukan lagi peran pemerintah desa melalui kader posyandu, bidan desa dan tenaga kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, baik di posyandu maupun di Poskesdes yang ada. Maka di perlukan Tenaga kesehatan yang pro aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga selain mengembnagkan ekonomi melalui pemebrdayaan kelompok penanganan dan pencegahan stunting menjadi proritas dalam pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana yang di cantangkan dalam program nasional dan kabupaten.

Saat ini Desa Sesaot mempunyai 1 unit Poskesdes yang dikelola oleh Bidan Desa, dan dua bauh bangunan balai posyandu di dusun penangke dan dusun temas lestariserta dimasing-masing dusun terdapat Posyandu bagi ibu hamil, bayi, balita dan lansia seperti Posyandu Mawar Di Dusun Gontoran Posyandu Wanatirta Di Dusun Sesaot Timuk Posyandu Mayang Mekar Di Dusun Sesaot Lauk Posyandu Permata Bunda Di Dusun PenangkePosyandu Melati Di Dusun Sambik Baru Posyandu Alam Lestari Di Dusun Temas Lestari.

6. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Sesaot sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi pengolahan hasil perkebunan dan hutan maupun pembinaan dan pemberdayaan dalam penembangan pada bidang sosial budaya sebagai pendukung pengembangan sektorwisata alam. Melalui penanfaatn sumber daya alam secara terarag Sehingga mendukung pembangunan desa sebagai pendapatan asli desa. namun sampai saat ini karena pengelolaan sumber daya alambelum maksimal sehingga belum mampu memberikan PADes secara berkesinambungn pada Pendapatan desa. saat ini penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaranPendapatan Desa meliputi :

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Dana Desa
 - b. Alokasi Dana Desa
 - c. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

Sebagaian besar mata pencaharian penduduk Desa Sesaot adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

7. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa melalui perinsip partispatif dan kesetaraan sebagai modal besar dalam pemabangunan desa sehingga dapat tumbuh kemandirian dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

- a. Prasarana kesehatan

Posyandu	: 6 unit
Poskesdes	: 1 unit

- | | |
|----------------|-----------|
| Bidan Desa | : 1 orang |
| Polindes | : 1 unit |
| Balai Posyandu | : 2 Unit |
- b. Prasarana Pendidikan
- | | |
|--------------------------|-----------|
| Taman Kanak – kanak / TK | : 1 unit |
| SLB | : - unit |
| SD / MI | : 3 unit |
| SLTP / MTs | : 1 unit |
| SLTA / MA | : - unit |
| TPA / TPQ | : 12 unit |
- c. Prasarana Umum lainnya
- | | |
|-------------------|-----------|
| Tempat ibadah | : 22 unit |
| Lapangan Olahraga | : 1 unit |

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

1.3. Kondisi Pemerintahan Desa Sesaot

a. Pembagian Wilayah Desa Sesaot

Desa Sesaot merupakan salah satu desa dari 21 desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan terbagi atas 6 dusun, yaitu :

1. Dusun Gontoran,
2. Dusun Sesaot Timuk,
3. Dusun Sesaot Lauk,
4. Dusun Penangke,
5. Dusun Sambik Baru, dan
6. Dusun Temas Lestari

Dari 6 wilayah dusun tersebut, Desa Sesaot terdiri dari 36 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Penduduk Desa Sesaot adalah **5.855 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 2.958 dan penduduk perempuan sebanyak 2.897**

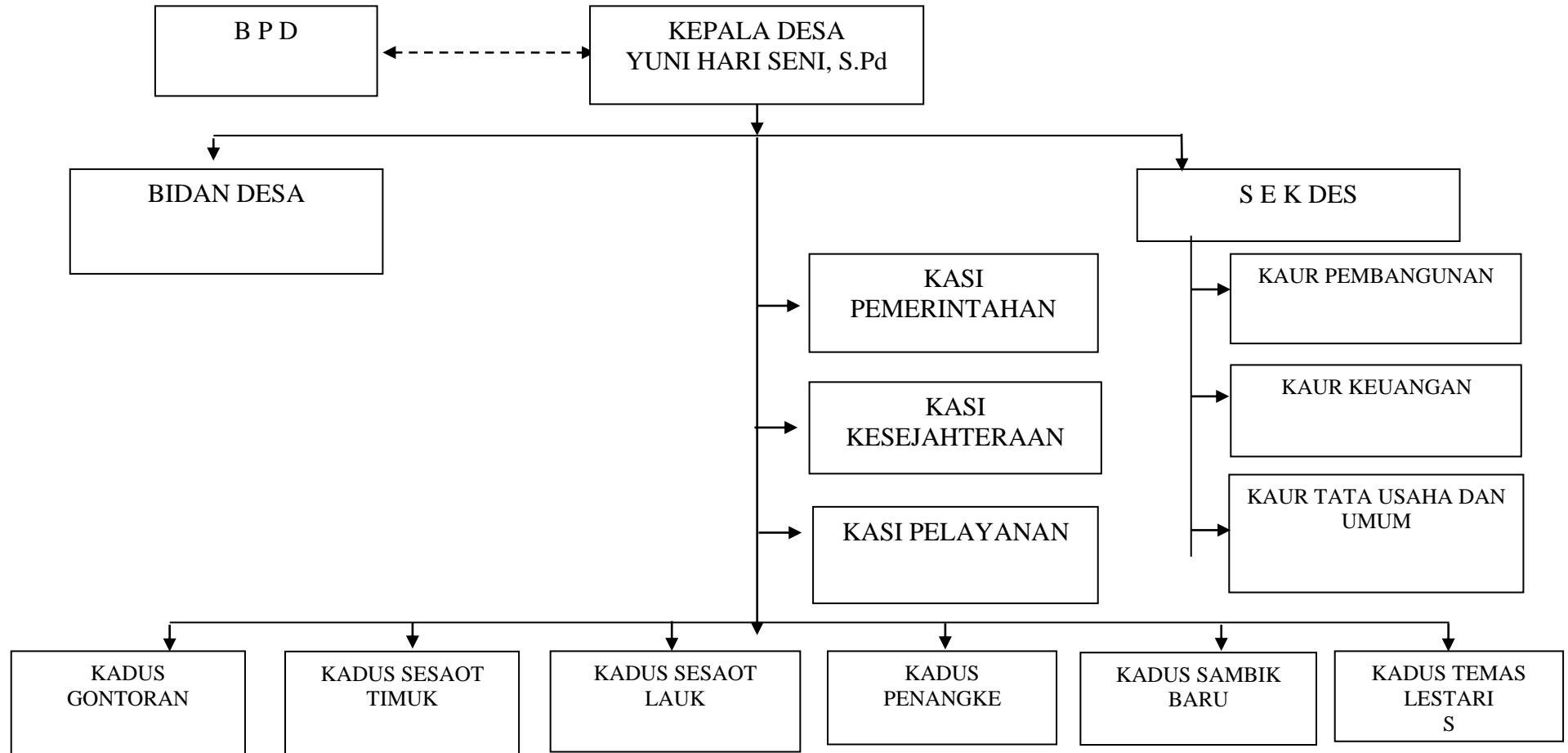
b. Kondisi Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari enam Kepala Dusun atau Kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA NARMADA



Daftar Nama-Nama Pejabat Pemdes Sesaot

No	Nama	Jabatan
1	YUNI HARI SENI,S.Pd	Kepala Desa
2	SAPARUDIN	Sekretaris Desa
3	EKA HIDAYTI,S.Pd	Kasi Pemerintahan
4	ISNAWATI,S Pd	Kasi Kesejahteraan
5	M.HAPIZUL PAHMI	Kasi Pelayanan
6	NIKMAH KHOIRIYAH	Kaur Keuangan
7	JAMALUDIN	Kaur Tata Usaha dan Umum
8	SALMAN HARMAIN	Kaur Perencanaan
9	BOBI SANJAYA	Dusun Gontoran
10	HAZRIL BAHRONI	Dusun Sesaot Timuk
11	M.JUMAHIR	Dusun Sesaot Lauk
12	SHOLIHIN	Dusun Penangke
13	JUNAEDI RIFATI	Dusun Sambik Baru
14	SUPARMAN	Dusun Temas Lestari
15	SALMAN HARMAIN	Oprerator Desa
16	SUHARMAN	Tenaga Kebersihan
17	SUHARMAN	Petugas Pennjaga Malam

Tabel :Nama Badan Permusyawaratan Desa Sesaot

No	Nama	Jabatn
1	SUHARTA	Ketua
2	MULIADI	Wakil Ketua
3	KARLINA MEGAWATI,S.Pd	Sekretaris
4	IDAWATI.S.Pd	Anggota
5	ADNAN	Anggota
6	RUDI IRAWAN,s.Pd	Anggota
7	MAHRUN,S.Pd	Anggota

c. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam

proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Tabel : Nama-nama LPMD Desa Sesaot

No	Nama	Jabatn
1	BAHRUDIN,S.Pd	Ketua
2	SUKRI WAHID,S.Pd	Ketual
3	IKLILUDIN ,SP	Ketua II
4	FATHURRAHMAN	Sekretaris I
5	L.SAEFUL ANWAR	Sekretaris II
6	YUSSALIMAH	Bendahara
7	JAELANI,S.Pd	Seksi Agama
8	SITI MAINAH	Seksi Kesejahteraan Sosial
9	BUDI SETIAWAN MAS'UDI,S.Pd	Seksi Pendidikan Dan Olah Raga
10	IMAM IBNU UMAR	Seksi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
11	DEWI KASITI	Seksi Koperasi Dan Usaha Kecil
12	ABDUL MANAN	Seksi Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban
13	ROBI HARTAWAN	Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum

e. Lembabaga Pemberdayaan Kesejahteraan Warga (PKK)

No	Nama	Jabatan
1.	NURHIDAYAH,S.Pd	Ketua
2.	IDAWTI,S.Pd	Wakil Ketua I
3.	ERLIN BUDIANI	Wakil Ketua Ii
4.	RINA SETIAWATI	Wakil Ketua Iii
5.	HAERULINA ZAHRAH	Wakil Ketua Iv
6.	CAHYA KHAERANI	Sekretaris

7.	ADESYA KHARISDAYATI	Wakil Sekretaris
8.	ROHYANI DEWI	Bendahara
9.	NENENG SUSILAWATI	Wakil Bendahara
10.	IDAWTI,S.Pd	Ketua Pokja I
11.	NUNUNG MARIANI	Wakil Ketua
12.	ANIS AULIA RAHMANI	Sekretaris
13.	1.DEWI RAHAYU,S.Pd	Anggota
14.	2.ZAETUN	Anggota
15.	3.ROSDIANA	Anggota
16.	4.SERIANIK	Anggota
17.	5.IIN SUMARLIN	Anggota
18.	ERLIN BUDIANI	Ketua Pokja II
19.	NURMIN,S.Kom	Wakil Ketua
20.	HERLIN SEPTIA KAMISWARI	Sekretaris
21.	1.LISPIANI,S.Pd	Anggota
22.	2.ROBIATUL ADAWIYAH	Anggota
23.	3.ASRI PUSPAWARI	Anggota
24.	4.SUPARTINAH	Anggota
25.	5.MAEMANAH	Anggota
26.	RINA SETIAWATI	Ketua Pokja III
27.	RIDIA YANTI ASTUTI,S.Pd	Wakil Ketua
28.	YUNI HARI YANTI,S.Pd	Sekretaris
29.	1.MAINAH	Anggota
30.	2. MARDIAH	Anggota
31.	3. ROBI'AH	Anggota
32.	4.MAEMUNAH	Anggota
33.	5.DEWI KASITI	Anggota
34.	BIDAN DESA	Ketua Pokja IV
35.	FATIMAH	Wakil Ketua
36.	BQ. DEVI IRIANI	Sekretaris
37.	1.YARNI	Anggota
38.	2.ENI USMAWATI	Anggota
39.	3.MARIA ULPA	Anggota
40.	4.SENIWATI	Anggota
41.	5.FATIMAH	Anggota

f. Rukun Tetangga (RT)

NO	NAMA	Jabatan	Dusun	KET.
1	BAHRI	RT 1	Gontoran	
2	SAPRI	RT 2	Gontoran	
3	SAHARUDIN	RT 3	Gontoran	
4	AMAQ SAHIL	RT 4	Gontoran	
5	MUSTAR	RT 5	Gontoran	
6	AHMAD SAJA'I	RT 1	Sesaot Timuk	
7	JAMA'AH	RT 2	Sesaot Timuk	
8	RUSDI	RT 3	Sesaot Timuk	
9	MANSURUDIN	RT 4	Sesaot Timuk	
10	JUMANI	RT 5	Sesaot Timuk	
11	RAMADHAN	RT 1	Sesaot Lauk	

12	BUDASIH	RT 2	Sesaot Lauk	
13	BUNIAMIN	RT 3	Sesaot Lauk	
14	SAHARUDIN	RT 4	Sesaot Lauk	
15	BURHANUDIN	RT 5	Sesaot Lauk	
16	MARIANTO	RT 6	Sesaot Lauk	
17	SALEHIN	RT 7	Sesaot Lauk	
18	I WYN SUWECE	RT 8	Sesaot Lauk	
19	FATHURRAHMAN	RT 1	Penangke	
20	MAHNI	RT 2	Penangke	
21	SATIRIM	RT 3	Penangke	
22	NAHARDI	RT 4	Penangke	
23	NURSINAH	RT 5	Penangke	
24	MUNARAH	RT 6	Penangke	
25	IPANDI	RT 1	Sambik Baru	
26	NURDIN	RT 2	Sambik Baru	
27	AHMAD	RT 3	Sambik Baru	
28	SAE'UN	RT 4	Sambik Baru	
29	SUNARDI	RT 5	Sambik Baru	
30	M.KASIM	RT 6	Sambik Baru	
31	SARDIAWAN	RT 7	Sambik Baru	
32	MINARI	RT 1	Temas Lestari	
33	ZAENAL	RT 2	Temas Lestari	
34	RATIMAH	RT 3	Temas Lestari	
35	SUKRI WAHID	RT 4	Temas Lestari	
36	HARDIANA	RT 5	Temas Lestari	

g. Kader Posyandu

1.	GONTORAN (POSYANDU MAWAR)	1	SITI ROHANI	Ketua
		2	ISLAMIAH	Sekretaris
		3	BAIQ DIANA	Anggota
		4	JUSNIATI	Anggota
		5	DESI SUSANTI	Anggota
2.	SESAOT TIMUK (POSYANDU WANATIRTA)	1	FATIMAH	Ketua
		2	WINDI LESTARI	Sekretaris
		3	NURHASANAH	Anggota
		4	NURHIDAYAH	Anggota
		5	ANDILIANI	Anggota
3.	SESAOT LAUK (POSYANDU MAYANG MEKAR)	1	YARNI	Ketua
		2	FATIMAH	Sekretaris
		3	SOFIANI	Anggota
		4	MARIA ULFA	Anggota
		5	LIA NOVIA ROSANTI	Anggota
4.	PENANGKE (POSYANDU PERMATA	1	ENI USMAWATI	Ketua
		2	INDAYANI	Sekretaris

	BUNDA)	3	DINI FITRIANI	Anggota
		4	NURHAYATI	Anggota
		5	TRISNA AYU	Anggota
5.	SAMBIK BARU (POSYANDU MELATI)	1	DEVI IRIANI	Ketua
		2	ASRI PUSPAWATI	Sekretaris
		3	BAIQ MAORI	Anggota
		4	DESI MURNIATI	Anggota
		5	FARIDA WALFA	Anggota
6.	TEMAS LESTARI (POSYANDU AHA LESTARI)	1	ROHYANI DEWI	Ketua
		2	AMELIA ULFA	Sekretaris
		3	YULIANTI	Anggota
		4	SENIWATI	Anggota
		5	YULI ANDREANI	Anggota

1.4. VISI dan MISI

I. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sesaot ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, serta dengan memperhatikan potensi dominan yang mengembangkan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu juga dengan memperhatikan arahan pembangunan perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat, bahwa Desa Sesaot kedepan diharapkan dapat menjadi Desa Wisata yang produktif dengan produk-produk unggulan sebagai hasil pengolahan dari berbagai macam produksi pertanian dan perkebunan.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Narmada mempunyai titik sektor Pertanian, dan Desa Sesaot merupakan daerah Agro wisata, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sesaot adalah :

“MEWUJUDKAN DESA SESAOT SEBAGAI DESAWISATA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, DAN MANDIRI ”

- a. Religius :Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Sesaot dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang Berakhlak mulia Pembangunan yang di dasarkan pada kemuliaan sikap dan prilaku yang diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi.
- b. Mandiri artinya tercukupinya kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat. Ini merupakan modal dasar untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, maka perlu kiranya pemberdayaan masyarakat dibidang kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta mempunyai desa dalam mengelola sumber daya.
- c. Berbudaya memabangun desa Sesaot sebagai desa wisata dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal masyarakat sebagai suatu kerifan lokal yang harus ditanamkan dalam setiap aspek pembangunan di desa Sesaot.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi

ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

B. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sesaot, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sesaot adalah :

01. Mencetak Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa melalui program-program keagamaan;
02. Mengembangkan budaya lokal melalui pengembangan nilai kesenian dan kebudayaan sebagai pendukung program desa wisata yang berbudaya;
03. Menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat
04. membentuk dan mengembangkan lembaga Adat dalam mempertahankan budaya lokal;
05. meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas publik yang dalam menunjang desa wisata;
06. Meningkatkan hubungan kemitraan dalam pengembangan wisata desa ;
07. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan wisata desa sebagai sector ekonomi berbasis masyarakat;
08. Meningkatkan peran pemerintahan desa dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab
09. Meningkatkan pengembangan potensi SDM dan memanfaatkan Potensi SDA berdasarkan kelestarian lingkungan
10. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2019-2025, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi sertamendorong keterkaitan desa-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai strategi di masing-masing dusun /Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Arah Kebijakan pembangunan Desa Sesaot ini dilakukan dan di padukan sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018 dan di integrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Desa selama enam tahun. Secara garis besar arah kebijakn pembangunan desa sesaot di gambarkan dalam empat bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Arahan kebijakan pembangunan di bidang Penyelenggaraan pemerintahan di desa Sesaot dibagi dalam beberapa sub bidang kegiatan yang akan menunjang jalannya dan pelayanan masyarakat yaitu sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- Penataan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- Pelaksanaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

2. Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa:

Bidang Pembangunan di desa Sesaot dalam mewujudkan visi dan misi kepala desa dibagi dalam beberapa sub bidang kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Pengembangan SDM dalam Bidang Pendidikan;
- Memebrikan pelayanan yang maksimal dalam bidang Kesehatan;
- Pembangunan dan peemliharaan dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Membenahi dan mengelola Kawasan Permukiman;
- Menyediakan sarana dan prasaran dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

- Pengembangan Inovasi desa dan teknologi tepat guna dalam rangka mewujudkan desa sesaot sebagai desa yang mandiri.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
- Menjaga dan memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :
 - Mengembangkan dan pembinaan dalam bidang Kebudayaan dan Keagamaan dalam mewujudkan desa sesaot yang religious dan berbudaya
 - Meningkatkan pengembangan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam mewujudkan desa sesaot yang Maju di bidang kepemudaan.
 - Pembinaan secara berkelanjutan pada Kelembagaan Masyarakat yang ada di desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut :
- Pengembangan Perikanan dalam memanfaatkan potensi air di desa
 - Pengembangan dan pembangunan ekonomi desa melalui inovasi di bidang Pertanian, perkebunan dan Peternakan dalam mewujudkan desa sesaot yang maju dan mandiri:
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 - Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 - Dukungan Penanaman Modal
 - Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Sub Bidang Keadaan Darurat

B. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah :

1. Dana Desa (DD) dari APBN
2. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
3. Program dari SKPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
4. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
5. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
6. Pembagian Hasil Pajak dari kabupaten
7. Dana lain-lain yang syah

Sumber-sumber dana tersebut guna pelaksanaan Pembangunan di Desa Sesaot selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam era otonomi daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa

dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatn desanya masing-masing.

C. Potensi dan Masalah

1. Potensi Desa

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu dilakukan pengkajian potensi dan masalah, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk menganalisa suatu potensi dan masalah diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa yang mengedapankan suatu Perencanaan Pembangunan secara partisiatif, hal tersebut telah dilaksanakan sehingga setelah dilakukan proses melalui Penggalian Keadaan desa dengan menggunakan 3 alat kaji yaitu : Peta Sosial Des , Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan desa yang memuat Potensi dan Masalah serta pengumpulan data-data yang yang di perlukan dalam menganalisis kebutuhan pembangunan selama enam tahun kedepan.

Keragaman Sumber Daya dan potensi yang dimiliki oleh Desa Sesaot sampai saat ini belum memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan dan perkembangan wilayah ini disebabkan pengelolaan, untuk itulah kiranya peran serta dan keterlibatan semua pihak sangat diharapkan. Pembangunan dan dukungan secara komprehensif merupakan suatu keharusan untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi yang ada, sehingga mimpi desa Sesaot menjadi Wilayah desa yang maju akan dapat diwujudkan.

Proses penjaringan di dapat dari hasil pagas dan sisa hasil Pengkajian Kondisi Desa tahun lalu dengan metode P3MD yang menggunakan tiga alat kaji yang meliputi Peta Sosial,Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan yang pada akhirnya akan didapatkan rekapan masalah,potensi dan data penduduk dan RTM dalam KK termasuk dalam kegiatan pada proses MKP. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Desa Sesaot terkait potensi yang dimiliki digambarkan sebagai berikut berikut .

1. Masalah

Daftar peta permasalahan ini diperoleh dari hasil penggalian gagasan di tingkat Dusun dan musdes penyusunan RPJM Desa Narmada yang

menghadirkan perwakilan dusun yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kekelengkapan dan keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya permasalahan maka diupayakan reduksi data, sehingga permasalahan yang ada penting dan aktual.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
	BIDANG PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan peralatan dan administrasi Desa perlu adanya kelengkapan peralatan kantor/peralatan rumah tangga desa, oprasipnal dan aministrasi desa 2. Batas desa dan banyaknya Dusun di Desa Sesaot perlu adanya penetapan dan penegasan batas Desa/Dusun; yaitu : gapura batas desa/Dusun. 3. Perkembangan penduduk yang ada di Desa Sesaot , status kepemilikan tanah yang belum tersurat perlu adanya Pendataan Desa: profil desa, Data penduduk, Monografi Desa, Fasilitasi Akte Kelahiran dan kematian, Pensertifikatan Tanah secara masal (prona) 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes, Musdes, Musdus 5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Pengelolaan SID, sketsa desa, peta desa, kalender Musim 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes , RKPDes, APBDes 7. Penyelenggaraan dan evaluasi

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
		<p>tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes & LRA</p> <p>8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras DAN SPP</p> <p>9. Profesionalitas kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien perlu adanya Peningkatan Administrasi Desa : Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK lembaga Desa (LPMD, PKK, Pokgiat LPMD, RT, Karangtaruna), Kelengkapan Administrasi RT dan peralatan RT, pembuatan Program sistem Informasi Desa untuk pelayanan Masyarakat, pengadaan Mesin Asbsensi Vinger Print,</p> <p>10. Peningkatan Keamanan : Poskamling, gardu Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan LINMAS, Pemasangan Kamera CCTV di area Balai Desa</p> <p>11. Peringatan hari Jadi Desa ; Penyelenggaraan Hari jadi Desa, Lomba RT, Lomba Dusun, Ekspo Desa, Gelar Budaya Desa</p> <p>12. Peningkatan Wawasan Kebangsaan : penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara</p>
	BIDANG PEMABANGUNAN DESA	<p>1. Banyak lokasi yang sering banjir, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : Pembuatan jembatan, pembangunan jalan (Cor Blok, Aspal), drainase, Saluran Irigasi , Pembangunan dan Perbaikan Pintu air, TPA (Sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, Rambu-rambu lalu Lintas, Meteran dan Instalasi Listrik bagi KK Miskin, Peninggian Bangket, Baliho Desa</p> <p>2. Penataan Tata Ruang Desa dan Bangunan kantor Desa yang sudah lama perlu adanya Pembangunan dan rehab sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu</p>

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
		<p>: Rehap Kantor Desa dan bangunan Pendukung lainnya, pembangunan ruang hijau desa (Taman Desa), Pengadaan Genset,</p> <p>3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu (Timbangan, Alat tensi), Alat Ukur (Diabetes, Kolesterol, Asam Urat), Jambanisasi, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Lantenisasi, MCK Komunal</p> <p>4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Produktif : Pembangunan gedung BUMDes, Pembangunan Kios Desa, Pembangunan wisata baru dimasing-masing dusun,</p> <p>5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu: TK, PAUD, TPQ.</p> <p>6. Pembangunan Tata Lingkungan peningkatan Kebersihan dan kesehatan masyarakat: pembangunan Kandang kelompok, Sanitasi, IPAL komunal, MCK Komunal, Peresapan Air Hujan. Pembangunan PAMSIMAS</p> <p>7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan pemanfaatan Lahan Pekarangan dan perkebunan.</p> <p>8. Pengembangan Infrastruktur dusun : Pembangunan Balai Dusun, pembangunan Pagar Makam, Pengadaan Peralatan Perawatan Jenazah, Papan Nama (Dukuh RT), papan Pengumuman, Papan makam, Pembangunan Tiang Bendera dan Tugu desa Papan Nama Jalan/Gang, Sumur Makam Pembangunan Menara Masjid, Pengadaan Sound System Pedukuhan, Pengadaan Genset, Pengadaan Taman Dusun</p> <p>9. Peningkatan Peribadahan</p>

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
		Masyarakat: rehap Masjid, pembangunan Bangunan Pendukung Masjid Penggantian Lahan/Sawah kas yang digunakan untuk fasilitas pendidikan/umum
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat: Pembinaan POSYANDU BALITA dan LANSIA, PHBS, PSN, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Gebyar Senam Sehat, Hatinya PKK, Penyuluhan Bahaya NAPSA, Deklarasi Stop BABS, Pengadaan Ambulan Desa, STBM 2. Pembinaan Pendidikan; pembinaan Guru PAUD, Pembinaan Guru TK, Honor Guru Paud dan TK Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, BPD, LPMD, PKK, Pokgiat LPMD, karang taruna dan lembaga adat desa 3. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan Kesejahteraan masyarakat: siskamling, pembinaan keluarga Sejahtera, 4. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, Pembinaan kaum Rois dan Pengadaan Alat Pengurusan jenazah (Kereta Jenazah), pembinaan kelompok yasinan, hadarah, dan kelompok banjar 5. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu: lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan desa serta pembinaan untuk calon atlit desa. 6. Pembinaan lembaga adat 7. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pengadaan gamelan kelompok Karawitan, sragam kesenian (kelompok kelompok Karawitan, sragam kesenian. 8. Peningkatan Kapasitas SDM : Out Bond, Kunjungan Karang taruna, Pembinaan kerja ke Luar Negeri, dan eks TKI dan TKW 9. Pembinaan para penandang

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
		disabilitas
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan barang bekas, Kopwan dan Puap, Pelatihan memasak KWT/PKK, Pelatihan BUMDes, Pelatihan Pembuatan Tempe/Emping Melinjo, pengembnagan produk local dari hasil kehutanan. 2. Peningkatan kapasitas/Ketrampilan masyarakat; yaitu: Pelatihan Montir, Pelatihan Bengkel (Las, AC, Dll), Pelatihan menjahit, pelatihan Tukang, pelatihan Batik, Pelatihan Memasak, danpengemnagan kelompok wisata desa 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,: <ol style="list-style-type: none"> a. Ekonomi Produktif : Modal BUMDes, Bantuan Modal UMKM, KUBE b. Pertanian : Sumur Bor Lahan Pertanian, Pengadaan Sarana Pertanian(Mesin tanam Padi, Mesin Tanam jagung, Mesin panen Padi, Mesin, Tleser, Alat Semprot, Disel Air, dll) pelatihan pembuatan pupuk Organik c. Peternakan; Pembangunan Kandang Kelompok, pelatihan pembuatan Pakan Ternak Perikanan : pembangunan dan Rehap Kolam Kelompok, Pelatihan Pembuatan pakan d. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Bang Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS, e. Wisata Alam Desa 4. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu :

NO	BIDANG	PERMASALAHAN
		<p>Bimtek Pamong Desa, Sosialisasi penyelenggaraan Pemdesa, Kunjungan Kerja, Perpustakaan Desa,</p> <p>5. Pelatihan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pelatihan karawitan,</p> <p>6. Peningkatan Gotong Royong Masyarakat ; Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong,</p> <p>7. Banyaknya kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum; Fasilitasi legalitas kelompok</p>

D. Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di Lingkungan Desa dapat **dilihat dalam lampiran.**

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam proses pengkajian keadaan desa. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Narmada selama 6 (enam) tahun kedepan.

D. Program Pembangunan Desa

Program-program pembangunan didesa untuk tahun 2020 termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2020. Dari program-program tersebut banyak kegiatan yang terlaksana, dan ada pula yang tidak dapat terlaksana. Selain itu ada pula yang dialihkan pelaksanaannya karena ada hal yang bersifat lebih prioritas. Contohnya seperti kegiatan rehab kantor desa, dalam perencanaan akan dilakukan pembangunan tembok kantor desa, guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di kantor desa sendiri. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya permasalahan terkait gugatan penguasaan/kepemilikan lahan tempat pembangunan kantor oleh warga, sehingga dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan tembok halaman kantor dialihkan untuk pengadaan alat-alat kelengkapan kantor berupa LCD Proyektor, Laptop, Genset, dan lain-lain. Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas.

1.5. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

a. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pengelolaan keuangan merupakan dua unsur yang cukup menentukan keberhasilan program perencanaan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan. Yang termasuk dalam factor intensifikasi dalam pengelolaan keuangan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan dari Bantuan Pemerintah, yang terdiri dari :

- Pendapatan Asli Desa
 - a. Pendapatan dari hasil tanah kas desa
 - b. Dana swadaya masyarakat (dana gotong royong)
 - c. Pendapatan dari biaya administrasi pembuatan surat-surat
 - d. Pendapatan dari pemilik tanah kebun/sawah yang dipisahkan, dan
 - e. Dana bagi hasil dari usaha yang dijalankan BUMDes
- Pendapatan dari Bantuan Pemerintah
 - a. Pemberian bantuan dari pemerintah propinsi
 - b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten berupa Alokasi Dana Desa, Dana Bagi-Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dan lainnya.

Sedangkan yang termasuk dalam factor Ekstensifikasi pengelolaan keuangan desa antara lain adalah dana-dana bantuan dari pihak lainnya, atau dalam APBDes disebut Penerimaan Lain-lain Yang Syah, terdiri dari :

- 1.4.1.1.1. Sumbangan dari Pabrik/Perusahaan yang ada di wilayah Desa
- 1.4.1.1.2. Dana bantuan dari pihak lainnya, dan
- 1.4.1.1.3. Sisa lebih pembiayaan (Silpa) tahun sebelumnya

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Dari dua factor pendapatan keuangan desa yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Desa telah menetapkan sumber-sumber pendapatan dengan target sebesar Rp. 2.278.902.500,- dengan pencapaian realisasi sampai dengan keadaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.307.665.284,- atau 97%. Berikut adalah gambaran realisasi pendapatan desa dalam tahun anggaran 2020, sebagai berikut.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0.00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.289.432.500
4.2.1.	Dana Desa	1.521.385.000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	78.762.784
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	688.517.500

4.3.	Pendapatan Lain-lain	
4.3.6.	Penerimaan Hadiah Lomba kampung Sehat	19.000.000
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.189.796,17
	JUMLAH PENDAPATAN	2.289.432.500

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa sebesar

Rp 2.289.432.500 (Dua Milyar Dua Ratus delapan puluh Sembilan Juta Empat ratus Tiga puluh dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5	BELANJA	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.500.000
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	410.500.000.00
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	120.388.100
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD	4.100.000
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.200.000
1.2.03	Penyediaan sarana Prasarana pemerintahan Desa	57.150.000

1.4.04.	Pengelolaan Adminstrasi Kependudukan	86.311.900
1.4.05	Penyelenggaraan Tata praja pemerintahan	75.555.500
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	9.000.000
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Insentif Kader)	240.973.000
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan (Untuk Masi, tenaga dll	3.290.000.00
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa	137.350.000
2.3.15.	Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air bersih Milik desa	60.513.500
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	55.518.500
2.8.1	Pemeliharaan sarana Prasarana pariwisata	129.140.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
3.1.02.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas)	26.600.000
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll)	6.687.000
3.2.90.	Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	5.000.000
3.2.99.	Pembinaan PKK	19.733.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	
5.1	Sub Bidang penangglangan bencana	1.001.700.000
	JUMLAH BELANJA	2.600.320.500

c. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dicapai Pemerintah Desa Juga, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan desa selama tahun 2020 antara lain:

Pos Penganggran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sehingga Mengakibatkan sebagian kegiatan Tidak Bisa dilaksanakan dengan Maksimal , untuk Manegatasi Permasalah tersebut Upaya yang ditempuh Pemerintah Desa Adalah dengan

memberikan penyertaan modal Ke BUMDES dan sambil mengatur Perencana keuangan Desa Sebaik Mungkin , juga Mencari bantuan Dana untuk mengembangkan Usaha BUMDES , Baik dari provinsi maupun Kabupaten dan mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBDesa. Dan melalui BUMDesa, Pemerintah Desa juga berharap adanya pemasukan untuk PAD.

Bencana Covid 19 Juga Salah Satu Penyebab Peraturan perundang-undangan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh pada lambatnya kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat koordinasi tiap bulan serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu terkait dengan keterbatasan pengelola IT.

d. Kebijakan Umum Belanja Desa

Pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2020 pada intinya telah menganut pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007, yaitu pembagian rekening belanja menjadi dua pos, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelompokan pos belanja ini dalam pelaksanaannya masih sering menghadapi kendala-kendala yang disebabkan karena masih minimnya pemahaman dari pengelola kegiatannya. Kurangnya pemahaman pengelola (bendahara) menyebabkan pelaporan pun masih perlu penyempurnaan. Pembedaan Belanja Pegawai antara yang masuk di pos belanja tidak langsung dan pos belanja tidak langsung tempat yang paling rentan terjadi kesalahan.

Pos-pos belanja pada APBDes Desa SESAOT tahun 2020 terdiri dari :

- a. Pos Belanja Tidak Langsung, yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Takterduga.
- b. Pos Belanja Langsung, mencakup aspek-aspek Belanja Honorarium, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Sebagaimana dengan definisinya yaitu Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah memberikan keleluasaan bagi pemerintahan desa dalam mengatur dan menata komponen-komponen pembangunan yang bersifat teknis.

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan sebuah program atau kegiatan tentu sekali dapat kita lihat dari sejauh mana tingkat pencapaian yang mengacu pada perencanaan awal yang meliputi volume, jumlah biaya, waktu pelaksanaan, kualitas dan yang tak kalah penting adalah penerima manfaat dan keberlanjutan dari hasil kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan bukanlah suatu hal yang sulit untuk mengukur sebuah tingkat pencapaian, akan tetapi yang paling sulit adalah mengukur keberhasilan dari tujuan dan manfaat kegiatan. Bukanlah suatu hal yang mudah terutama keberlanjutan program karena selama ini masyarakat hanya menerima dan melaksanakan sehingga tanggungjawab selalu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Namun setelah adanya pola pembangunan yang partisipatif, dengan proses perencanaan *bottom up* yaitu dari bawah atau masyarakat turut serta menggagas dan memberikan solusi atas permasalahan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga setiap program yang telah dilaksanakan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, walaupun kita sadari bahwa tak ada suatu yang sempurna namun dengan adanya kekurangan menjadi motivasi bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk lebih meningkatkan peran sehingga harapan pembangunan yang dihayatkan oleh masyarakat bisa tersentuh dan diterima oleh semua lapisan.

3. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan maupun pembangunan, tentu sekali Kepala Desa, selaku pejabat yang mempunyai kewenangan mengatur, tentunya akan sulit untuk merealisasikan program yang telah direncanakan tanpa melibatkan unsur-unsur terkait di desa untuk membantu. Untuk itu Kepala Desa telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan, yang berperan untuk menyampaikan sosialisasi program dan mengkoordinir segala kegiatan pembangunan yang

melibatkan masyarakat, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan pen.

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Desa Sesaot telah menetapkan alokasi kegiatan pembangunan baik secara administrasi maupun fisik, masing-masing telah memiliki pos anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, adapun perkembangan kegiatan kami sampaikan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan ini.

4.3. Proses Perencanaan Pembangunan

Agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dapat mendukung rumusan kebijakan pembangunan maka setiap perencanaan pembangunan diupayakan melalui tahapan proses yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang hasilnya dituangkan dalam RPJMDes dan RKP, dengan proses yang disepakati antara lain :

4.3.1.1.1. Sosialisasi

4.3.1.1.2. Musyawarah Dusun/Penggalan gagasan

4.3.1.1.3. Musyawarah kelompok

4.3.1.1.4. Musyawarah Desa

4.3.1.1.5. Perangkingan

4.3.1.1.6. Penetapan prioritas

4.3.1.1.7. Pengajuan usulan

Sebagaimana alur yang telah ditetapkan, bahwa pelaksanaan perumusan/perencanaan kegiatan tahunan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) satu tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah merupakan perencanaan dalam tahun 2013 yang disempurnakan dalam musrenbangdes yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

4.4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Desa

- 1 Kantor dan Aula
- Meja Kursi rapat dan Perangkat Penunjang Administrasi (1 Unit Komputer, dan 6 unit Laptop)
- 1 buah Kendaraan /Sepeda Motor Dinas
- 2 Unit R3
- Kursi Tamu 2 Set

b. Bidang Kesehatan

- 2 lokal Pelayanan Poskesdes
- Posyandu di masing-masing dusun

c. Bidang Pendidikan

- 1 Unit Gedung dan 4 PAUD
- 2 Unit Gedung SD Negeri
- 1 Unit Gedung SMP Negeri

- d. Sarana Ibadah
 - Mushalla : 11 Unit
 - Masjid : 5 Unit
 - Pura : 1 Unit
- e. Sarana Perhubungan / Jalan:
 - Jalan Kabupaten : ± 9 km
 - Jalan Desa : ± 10 km
 - Jalan Dusun : ± 18 km
- f. Sarana Ekonomi / Perusahaan :
 - Kelompok Wana Lestari yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil pertanian/perkebunan
 - Batako , Blok dan Gipsun
 - Pengelasan
 - Home Stay

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerja sama antar Desa

Dalam tahun anggaran 2020 kerjasama antar desa yang kami lakukan masih bersifat kontemporer, yaitu berupa saling pinjam sarana-prasarana Desa yang dimiliki. Selain itu juga, Pemerintah Desa Sesaot juga melakukan kerja sama dengan desa-desa yang ada disekitarnya, diantaranya dengan Desa dengan Desa Lebah Sempage dan Buwun Sejati dalam urusan Prasarana Jalan.

B. Kerjasama dengan pihak ketiga

Untuk hal ini, pemerintahan Desa telah melakukan kerjasama dengan Perusahaan/Pengusaha yang berada di wilayah Desa Sesaot, melalui Asosiasi Jasa Pariwisata Sesaot (AJPS) dalam pengelolaan dan pengendalian pariwisata di Wilayah Desa Sesaot. Selain itu, Pemerintah Desa juga telah menjalin kerjasama dengan PKBM Gema Sesaot dalam beberapa kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan.

C. Batas Desa

Dalam rangka menghindari terjadinya sengketa tentang batas desa, Pemerintah Desa telah menempatkan tapal batas desa berupa pembuatan

tugu batas desa/pintu gerbang desa diperbatasan desa dengan Desa Suranadi di perbatasan sebelah selatan dan Desa Pakuan di jalan Kabupaten yang melintasi Desa bagian timur.

Dalam hal batas desa ini terdapat permasalahan yang muncul akhir-akhir ini adalah adanya penduduk yang tinggal dalam wilayah Desa Buwun Sejati namun menjadi warga Desa Sesaot, warga desa Sesaot yang tinggal di wilayah Desa Suranadi dan Buwun Sejati namun menjadi tetap menjadi warga Desa Sesaot, Pemerintah Desa telah berupaya menertibkan hal tersebut bersama pemerintah desanya masing-masing, tapi masih belum berhasil karena sudah kuatnya ikatan tali keturunan dan kepentingan.

Namun, secara umum selama ini belum pernah terjadi sengketa tentang perbatasan desa, sehingga pembentukan satuan pelaksana kegiatan desa terkait Sengketa Batas Desa, belum pernah kami lakukan, karena selama pemerintahan utamanya dalam tahun 2020 permasalahan tersebut tidak pernah ada/terjadi.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Untuk Wilayah Desa Sesaot secara umum, bencana dalam skala besar belum pernah terjadi. Tetapi kami tetap berusaha untuk mengantisipasi terhadap bencana-bencana secara umum yang dapat terjadi, terutama dalam bidang kesehatan dengan terbentuknya desa siaga yang akan berusaha secara maksimal dalam penanggulangan masalah kesehatan dan lainnya.

Adapun bencana yang sudah melanda Desa Sesaot diantaranya tanah longsor yang tidak menimbulkan korban, ditanggulangi langsung dengan melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat. Dan yang lainnya adalah jebolnya tanggul irigasi pertanian di Dusun Sesaot Barat, ditanggulangi langsung oleh Pekasih subak wilayah tersebut dan dibiayai dengan swadaya masyarakat. Dalam bidang kesehatan dengan terjadinya kasus Demam Berdarah yang menimpa beberapa warga di Dusun Sesaot Utara dan Eyat Kandel. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Puskesmas Sedau dan telah dilakukan pemeriksaan intensif dengan hasil tidak perlu melakukan fogging, karena tidak ditemukannya jentik nyamuk DB.

Selanjutnya terkait sebagai imbas daerah pariwisata dalam bidang kesehatan adalah penyebaran penyakit HIV/AIDs. Dalam hal ini, Pemerintah Desa telah berupaya melakukan tindakan pencegahan dengan bekerjasama dengan PKBM Bina Harapan Sesaot yang berada di wilayah Desa, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit HIV/AIDs tersebut. Sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan kepada siswa-siswa baik siswa SMP dan SMA di wilayah Kecamatan Narmada.

BAB VII PENUTUP

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) ini dapat kami susun.

Penyusunan LKPJ Kepala Desa akhir tahun ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kami selaku pelaksana Pemerintah Desa yang telah

melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yaitu tahun 2020 yang telah berlalu.

Adalah impian kami untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, baik pelayanan public, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dalam segala hal, meningkatkan keamanan dan ketertiban, peningkatan derajat kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang mengarah pada kemajuan, kesemuanya itu kami berusaha semaksimal mungkin.

Tetapi dibalik itu ada keterbatasan yang menghalangi, ada kekurangan yang kami miliki sehingga apa yang kami cita-citakan tidaklah sepenuhnya dapat kami wujudkan. Untuk itu segala petunjuk, kritik dan saran sangat kami harapkan. Program dan target kami rencanakan namun realisasi tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana dan target, untuk itu sekali lagi kami berharap pendapat dan dukungan sehingga kami dapat berbuat yang lebih baik kedepannya.

Ahirnya juga kami menyadari laporan ini jauh dari kesempurnaan, mohon petunjuk yang lebih jelas dan lugas agar kami dapat membuat yang lebih baik lagi.

Kepala Desa Sesaot,

YUNI HARI SENI, S.Pd